

KPKNL PEKANBARU

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Pekanbaru. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, 05 Mei 2023
Kepala Kantor,

Maulina Fahmilita
NIP 197105141998032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iv
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	25
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	32
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	40
VI. Lampiran dan Daftar.....	41

KPKNL PEKANBARU
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 24, SIMPANG TIGA, PEKANBARU
TELEPON (0761) 23845; FAKSIMILE (0761) 44593

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 (*Unaudited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2022 yang sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 05 Mei 2023
Kepala Kantor,

Maulina Fahmilita
NIP 197105141998032002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan KPKNL Pekanbaru Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara Tahunan TA 2022 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp35,624,202,684 atau mencapai 896 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3,976,982,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp23,971,244,034 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp100,935,347; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp23,870,308,687; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Sementara itu, nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp106,129,040 dan Rp23,865,114,994.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35,525,342,684, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2,178,009,883 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp33,347,332,801. Selanjutnya, Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp94,927,000 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp33,347,332,801.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.576.317.270, ditambah Surplus/Defisit-LO TA 2022 sebesar Rp3.365.733.180, ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0, dan dikurang Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.731.688.660 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp24.210.361.790.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

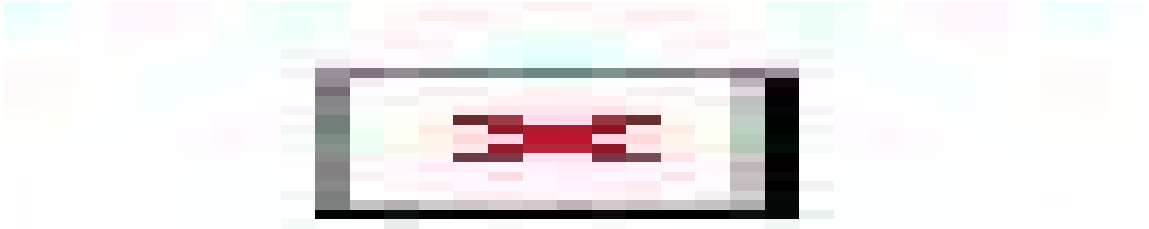
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 menggunakan basis kas. Sementara itu, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahunan untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

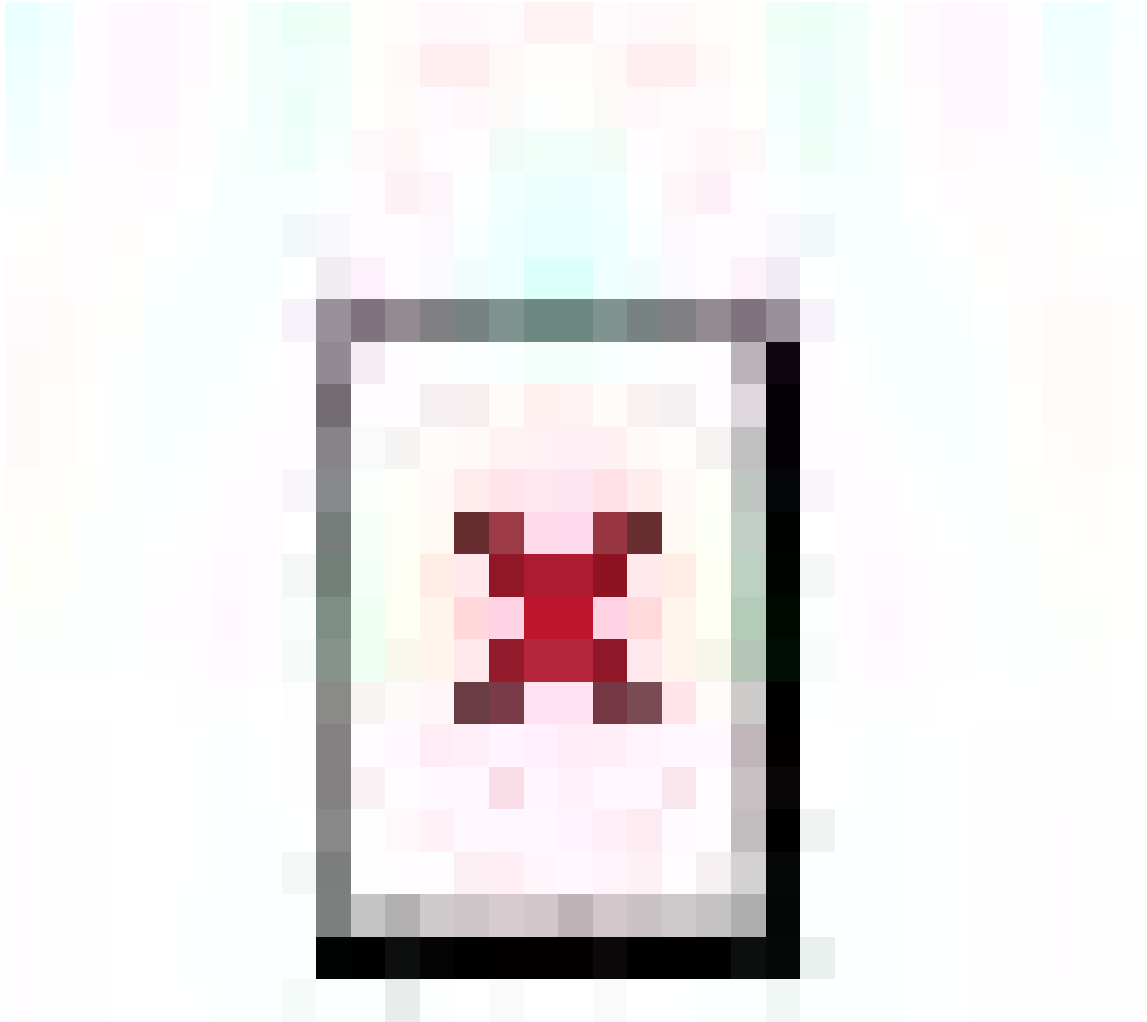


Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

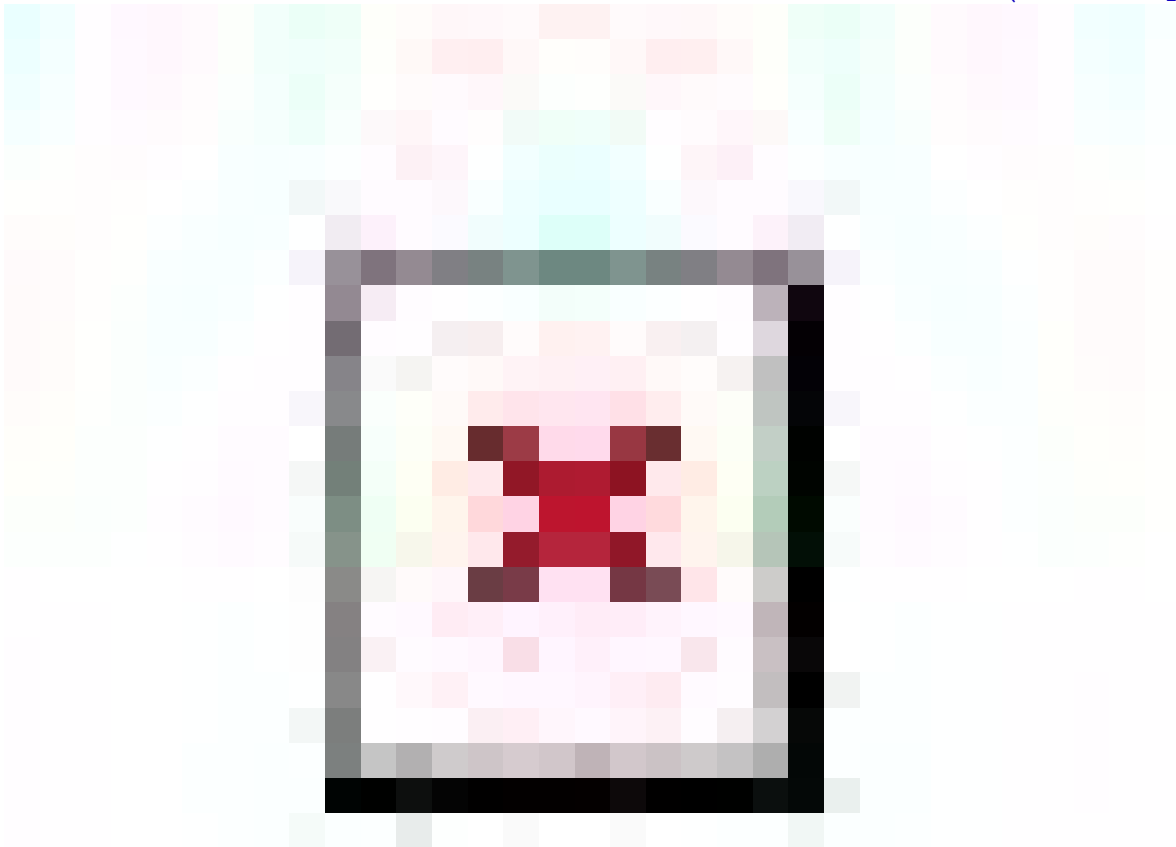


Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 24, Simpang Tiga, Pekanbaru.

KPKNL Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Hal ini diwujudkan dengan visi KPKNL Pekanbaru yang menginduk pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Pekanbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk

menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara itu, SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sementara itu, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Pekanbaru dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPKNL Pekanbaru. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Pekanbaru adalah sebagai berikut.

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan, sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan

berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai

perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya antara lain berupa aset tak berwujud, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama triwulan ketiga periode anggaran tahun 2022, KPKNL Pekanbaru telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 6 (enam) kali. yaitu sebagai berikut :

1. Revisi ke 3, 4 dan 5 melalui DJA dalam rangka Perubahan output dan Anggran pada Output Top Down.
2. Revisi ke 1,2,4,6 melalui Kanwil DJPB Provinsi Riau. untuk merevisi perubahan rencana penarikan halaman III DIPA.

B.1 Pendapatan

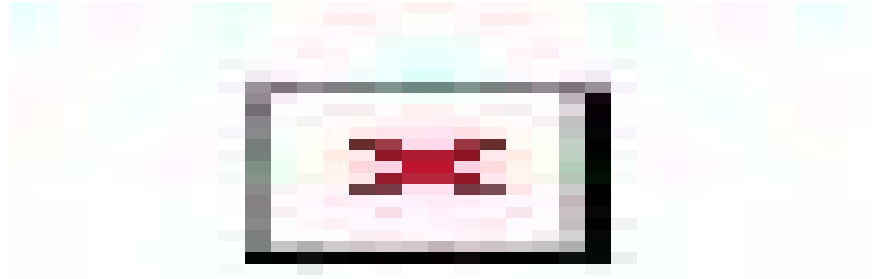
*Realisasi
Pendapatan
Rp35.624.202.68
4*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.624.202.684 atau mencapai 896 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.976.982.000. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPKNL Pekanbaru terdiri dari

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang berasal dari sewa Rumah Dinas Golongan III yang pada tahun 2022 ditempati oleh kepala kantor dan kepala seksi;
2. Pendapatan Jasa Lainnya, seperti penyeteroran denda wanprestasi;
3. Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I;
4. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian;
5. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara; dan

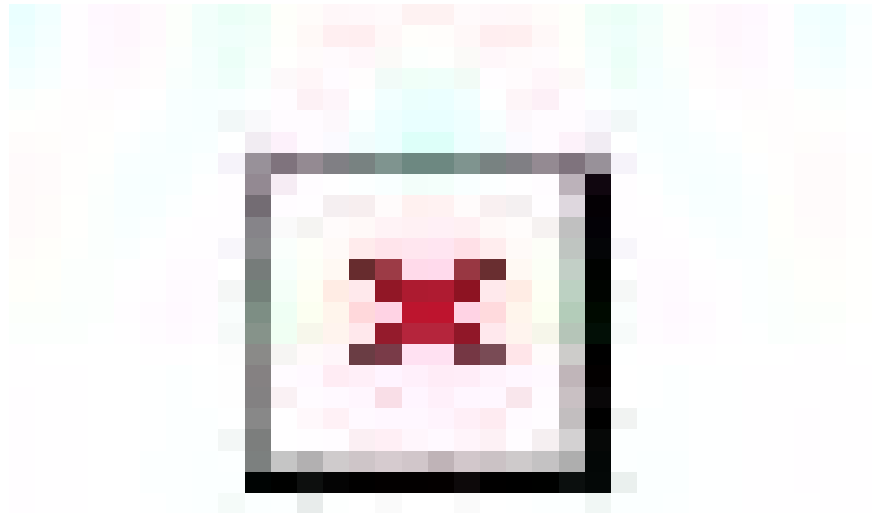
Rincian realisasi pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan



Realisasi Pendapatan PNBP Tahunan per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 72 persen dibandingkan Tahunan TA 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain peningkatan Pendapatan Bea Lelang serta Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan TA 2021



*Realisasi Belanja
Negara
Rp1.708.686.930*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahunan TA 2022 adalah sebesar Rp1.708.686.930 atau 98% dari anggaran belanja TA 2021 sebesar Rp1.783.906.051. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan TA 2022



Dibandingkan dengan Belanja Tahunan TA 2021, Realisasi Belanja Tahunan TA 2022 mengalami Penurunan sebesar 4%.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan Per 31 Desember 2022 dan TA 2021



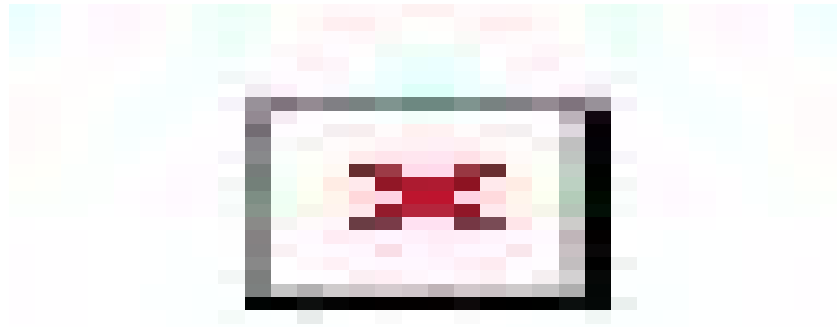
*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Triwulan III Per 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal. Sejak Pertengahan tahun 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan sentralisasi belanja pegawai, sehingga KPKNL Pekanbaru tidak lagi mengeluarkan belanja pegawai.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Periode 31 Desember 2022



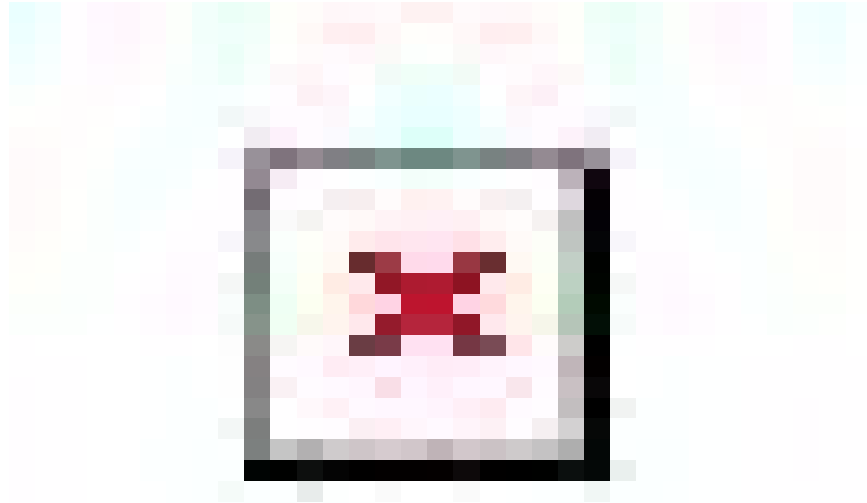
Belanja Barang

Rp1.708.686.930

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.708.686.930 dan Rp1.729.533.051. Realisasi Belanja Barang Tahunan per 31 Desember 2022 sebesar 90% dari Anggaran TA 2022 sebesar Rp1.758.965.000.

Laporan Realisasi Belanja Barang Periode 31 Desember 2022



Belanja Modal

Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahunan per Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp54.373.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahunan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh volume pengadaan barang yang lebih sedikit.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 dan 2021



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Pengeluaran

Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember
2022 dan 2021*



C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di

Bendahara

Penerimaan

Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0 dikarenakan semua setoran dilaksanakan secara tepat waktu.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember
2022 dan 2021*



C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan

Setara Kas

Rp83.710.746

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp83.710.746 dan Rp55.790.790.

Kas Lainnya merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas bendahara penerimaan yang berasal dari pihak ketiga, dan pajak bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas Negara. Sementara itu, Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2022 dan 2021

Persediaan
Rp17.224.601

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp17.224.601 dan Rp29.315.818 . Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.5 Tanah

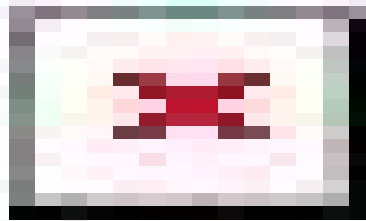
Tanah
Rp15.746.201.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Pekanbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp15.746.201.000 dan Rp15.746.201.000.

C.6 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin*
Rp3.936.819.443

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp3.936.819.443 dan Rp3.989.068.943 .



*Gedung dan
Bangunan*
Rp8.494.054.000

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp8.494.054.000 dan Rp8.378.496.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



*Jalan, Jaringan,
dan Irigasi Rp0*

C.8 Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp115.558.000. Mutasi transaksi Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Terjadi reklasifikasi asset tetap dari jalan irigasi dan jaringan menjadi Gedung terbuka lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp4.273.809.756)*

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing (Rp4.273.809.756) dan (Rp4.048.277.971). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahunan Per 31 Desember 2022*



Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain **C.10 Aset Lain-Lain**

Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut.



Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2022

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp55.790.790

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp106.129.040 dan Rp55.790.790 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada KPKNL Pekanbaru per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

*Ekuitas**Rp23,865,114,994***C.13 Ekuitas**

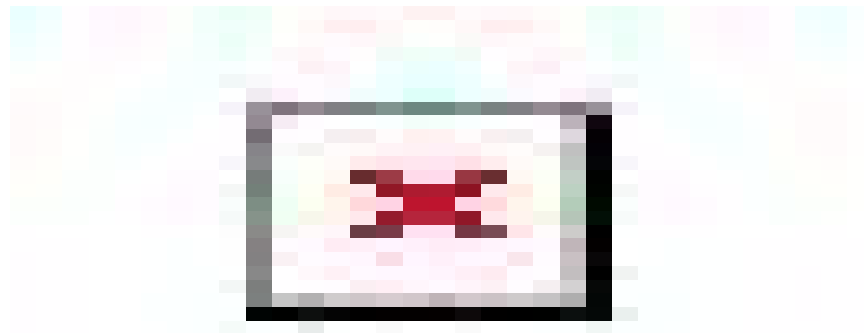
Ekuitas Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23,865,114,994 dan Rp24.210.361.790. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**Pendapatan D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak****PNBP****Rp5.498.159.711**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp35.624.202.684 dan Rp5.498.159.711. Pendapatan tersebut antara lain terdiri dari

1. Pendapatan Bea Lelang diperoleh dari penyetoran Bea Lelang Penjual dan Pembeli Lelang yang disetor melalui Bendahara Penerimaan KPKNL Pekanbaru;
2. Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara diperoleh dari debitur; dan
3. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian.

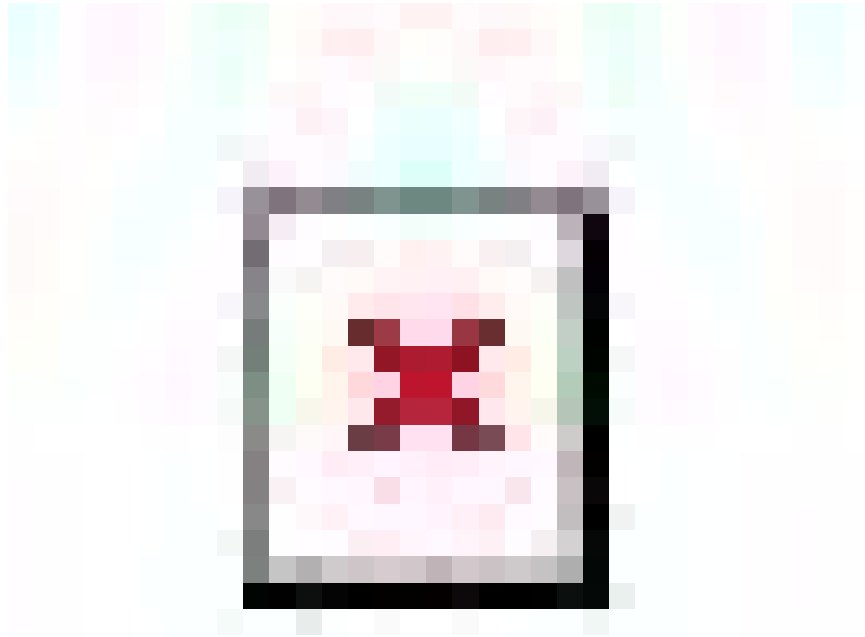
*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahunan Per 31 Desember 2022*

**Beban****Pegawai****Rp0****D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal. Sejak dari pertengahan tahun 2020, belanja pegawai pada Direktorat jenderal Kekayaan Negara sudah melakukan sentralisasi belanja pegawai, sehingga akun belanja pegawai sudah tidak muncul pada Laporan operasional KPKNL Pekanbaru.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 2021



*Beban
Persediaan
Rp57.734.022*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp68.001.675 dan Rp57.734.022 . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

*Rincian Beban Persediaan Tahunan Per 31 Desember
2022 dan 2021*



*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.171.694.426*

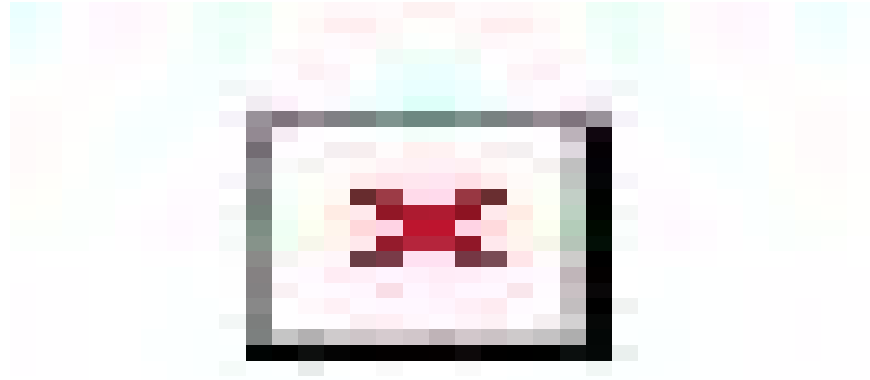
D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.171.694.426 dan Rp1.170.038.593. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Kenaikan Beban Barang dan Jasa karena ada pembelanjaan keperluan sehari-hari perkantoran dan pembayaran Honor ke-13. pembelian obat-obatan yang lebih banyak dan biaya pengiriman surat yang lebih banyak.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan Per 31
Desember 2022 dan 2021*



*Beban
Pemeliharaan
Rp325.507.989*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp325.507.989 dan Rp366.137.914. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan terjadi karena Rincian beban pemeliharaan untuk Tahunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

*Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan Per 31 Desember
2022 dan 2021*



*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp177.331.999*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp177.331.999 dan Rp150.432.452 . Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban

perjalanan dinas disebabkan oleh Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan Per 31 Desember 2022 dan 2021

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp449.028.216*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp449.028.216 dan Rp446.148.475 . Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan Per 31 Desember 2022 dan 2021

Surplus/ **D.8 Kegiatan Non Operasional**
Defisit dari Pos surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri
Kegiatan Non dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan
Operasional bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus
Rp17.435.000 dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan
2021 adalah sebagai berikut.

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Tahunan Per 31 Desember 2022 dan 2021*



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<p><i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp24.576.317.270</i></p>	<p>E.1 Ekuitas Awal</p> <p>Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.200.080.016 dan Rp24.576.317.270 .</p>
<p><i>Surplus (Defisit) LO</i> <i>Rp33.442.259.801</i></p>	<p>E.2 Surplus (Defisit) LO</p> <p>Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp33.442.259.801 dan Rp3.355.451.406. Surplus LO merupakan kelebihan antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.</p>
<p><i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i> <i>Rp0</i></p>	<p>E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap</p> <p>Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.</p> <p>Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.</p>
<p><i>Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi</i> <i>Rp0</i></p>	<p>E.3.1 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi</p> <p>Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.</p>
<p><i>Transaksi Antar Entitas</i> <i>(Rp3.731.688.660)</i></p>	<p>E.4 Transaksi Antar Entitas</p> <p>Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp3.731.688.660) dan (Rp3.731.688.660). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN.</p>

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp5.515.594.711, sedangkan DKEL sebesar Rp1.783.906.051.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pada periode hingga 31 Desember 2022, tidak terdapat Transfer Masuk dan Transfer Keluar.

Ekuitas Akhir
Rp24.210.361.790

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.210.361.790 dan Rp24.210.361.790 .

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Ditahun 2022 terjadi Reklasifikasi ast tetap dari jalan dan irigasi menjadi bangunan terbuka lainnya, Sebesar Rp.. 115.558.000

LAMPIRAN
